PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang)

THE INFLUENCE OF TAX EXTENSIFICATION AND INTENSIFICATION ON LOCAL TAX REVENUE

(*The Research On* Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang)

Oleh:
Dendi Barkah
21110213

Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research aims to determine influence of Extensification and Intensification Taxation partially or simultaneous on Local Tax Revenue.

The research methods are using descriptive methods and verification. With the population and sample as many as 12 employees and data realization of local tax revenues in 2009-2013.

The results showed that on partially, Extensification and Intensification Taxation are positive significantly affect on Tax Revenue. While simultaneously, Extensification and Intensification Taxation are significant on Tax Revenue. Extensification and intensification influence Tax Revenue on 65.1%, while the remaining 34.9% is contributed by other variables not examined.

Keyword : Tax Extensification, Tax Intensification, Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Moh. Zain, 2005). Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:26).

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai warga negara wajib membayar pajak, pentingnya pajak harus terus disosialisasikan agar terbangun kesadaran dan melakukan kewajiban tepat pada waktunya (Dada Rosada, 2013).

Pajak memiliki dua fungsi yang pertama adalah fungsi budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulered*)yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang mengalami kenaikan diharapkan dapat membayar pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat.

Realisasi target penerimaan pajak penghasilan tahun 2012 mulai menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2011. Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pajak penghasilan (PPh) non-migas per 28 September 2012 sebesar Rp284,07 triliun. Pencapaian tersebut baru 63,73% dari target Rp445,73 triliun yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Realisasi target per September tahun ini lebih kecil dari realisasi target pada periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 71,26%.

Memasuki tahun 2013, pemerintah melalui Institusi Kementrian Keuangan menetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan insfrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara (Surya Manurung, 2013). Tetapi hingga bulan Oktober 2013 penerimaan pajak hanya mencapai 72% dari target yang diharapkan mencapai 97% (Fuad Rahmany, 2013).

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saldo piutang pajak 31 Desember 2011 mencapai Rp 86,5 triliun, lalu berkurang Rp 12,24 triliun satu tahun kemudian per 31 Desember 2012 menjadi Rp 74,26 triliun. Ini salah satunya tercapai berkat penagihan yang menjadi langkah penegakan aturan terhadap wajib pajak, di samping pemeriksaan dan penyidikan pajak yang sudah masuk ranah hukum pidana (Sylvia Veronica, 2013).

Berdasarkan data turunnya saldo piutang pajak itu, upaya penegakan hukum terlihat cukup efektif. Ini juga tergambarkan dari terus naiknya rasio kepatuhan wajib pajak dalam periode 2006-2010. Pada 2006, rasio ini 33,08 persen, tapi setahun kemudian naik drastis menjadi 54,15 persen, lalu naik lagi pada 2010 menjadi 58,16 persen. Sayang pada 2011 yang adalah ketika kasus Gayus Tambunan meledak, rasio turun ke 52,74 persen. Dari gambaran statistikal itu jelas ada korelasi kepatuhan wajib pajak dengan penilaian wajib pajak kepada sistem pengelolaan pajak, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi mengumpulkan pajak (Sylvia Veronica, 2013).

Penegakan hukum memang harus dilakukan, tapi bila ada bukti wajib pajak yang membayar pajak memang masih rendah. Dalam kaitan ini Ditjen Pajak harus memastikan sosialisasi sejelas-jelasnya mengenai aturan perpajakan sampai kepada wajib pajak. Selama ini Ditjen Pajak telah dan terus mengupayakan informasi mengenai pajak sampai kepada wajib pajak. Web resmi Ditjen Pajak telah memuat banyak informasi, termasuk tentang aturan pajak dan cara menghitung pajak. Media online juga banyak menyajikan informasi mengenai pajak (Sylvia Veronica, 2013).

Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan secara simultan guna mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan (Telisa Aulia Falianty, 2012). Kurangnya jumlah pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia berakibat kurangnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sehingga berpotensi pendapatan pajak yang tidak bisa digali untuk negara (Fuad Rahmany, 2014).

Meski demikian, baik intensifikasi dan ekstensifikasi pajak memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Intensifikasi lebih minim biaya, karena hanya melakukan penagihan kepada wajib pajak yang sudah ada. Namun, langkah ini dinilai membutuhkan penegakkan hukum paksa yang lebih ketat (Telisa Aulia Falianty, 2012). Sementara itu, ekstensifikasi dinilai memakan biaya yang lebih besar karena cara ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak menyusun daftar

wajib pajak baru. Oleh karena itu, baik intensifikasi dan ekstensifikasi hendaknya dilakukan bersamaan demi tercapainya peningkatan penerimaan pajak (Telisa Aulia Falianty, 2012).

Masih banyaknya pegawai pajak yang curang sehingga penerimaan pajak menjadi tidak beres (Basuki Tjahaja Purnama, 2014). Hal ini dapat mempengaruhi minat wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Menurut Agus Martowardojo (2013), orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajak / melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen.

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas, diyakini bahwa dengan penerapan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan (efektif dan efisien) maka diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan berbagai masalah perpajakan yang telah dipaparkan di atas, dikhawatirkan akan menyebabkan penerimaan negara dalam sektor pajak akan berkurang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul: **"Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Daerah"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.
2. Apakah Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.
3. Apakah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.
2. Untuk mengetahui apakah Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.
3. Untuk mengetahui apakah Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa:

"Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak".

2.1.1.1 Indikator Ekstensifikasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001, ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, penulis menyimpulkan indikator ekstensifikasi perpajakan adalah:

1. Wajib pajak terdaftar.

2. Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahun.
3. Peningkatan dengan adanya kegiatan pendataan objek pajak.

2.1.2 Pengertian Intensifikasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa:

"Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak".

2.1.2.1 Indikator Intensifikasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001, ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, penulis menyimpulkan indikator intensifikasi perpajakan adalah:

1. Penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah.
2. Penambahan unit-unit pembantu.
3. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara jabatan.

2.1.3 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Pasal 1 No. 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN:

"Penerimaan Pajak adalah penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.2.1 Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak

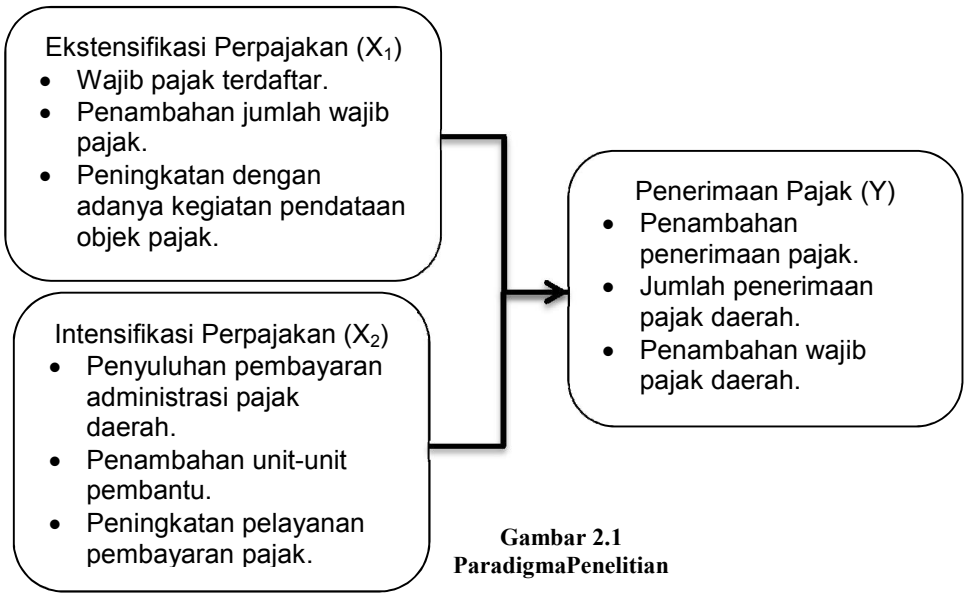
Teori penghubung ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak daerah menurut Syafrianto (2007) adalah sebagai berikut:

"Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan dapat berupa ekstensifikasi ataupun intensifikasi di bidang perpajakan Direktorat Jenderal Pajak".

2.2.2 Pengaruh Intensifikasi terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

"Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak".



Gambar 2.1
ParadigmaPenelitian

2.3 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2011:64) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H_2 : Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

H_3 : Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Husein Umar dalam Umi Narimawati (2010) adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu".

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Ekstensifikasi, Intensifikasi Perpajakan dan Penerimaan Pajak Daerah.

3.2 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitan menurut Sugiyono (2010:2) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis".

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka metode penelitian adalah teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah yang kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data yang akan diinginkan.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain menurut Moh. Nazir (2003:84) dalam Umi Narimawati (2010:30) mendefinisikan desain penelitian adalah sebagai berikut:

"Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:30) yang peneliti terapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian yang yaitu Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi;
3. Menetapkan rumusan masalah;
4. Menetapkan tujuan penelitian;
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomena dan dukungan teori;
6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan;
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data;

8. Melakukan analisis data;
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69)**,** Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Menurut Sugiyono (2010: 38), menyatakan bahwa variabel adalah sebagai berikut:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentan hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu:

1. Variabel Bebas/Independent (X)
   Dalam penelitian variabel bebas yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah variabel X_1 adalah Ekstensifikasi Perpajakan dan X_2 adalah Intensifikasi Perpajakan.
2. Variabel Terikat/Dependen (Y)
   Dalam penelitian variabel terikat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Penerimaan Pajak Daerah.

3.4 Sumber Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat beberapa metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan antara lain agar mempermudah dalam penelitian mengambil suatu pengumpulan data. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer menurut Sugiyono (2012:137) sebagai berikut:

"Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data".

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengetahui tanggapan tentang variabel yang akan diteliti.

Sedangkan pengertian data sekunder menurut Umi Narimawati, SE., M.Si (2008:21) menyatakan bahwa:

"Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak perusahaan, yang biasanya sudah tersedia dalam bentuk laporan keuangan".

Data sekunder dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang tahun 2008 hingga 2013.

3.5 Populasi dan Penarikan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80), populasi didefinisikan sebagai berikut:

"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:37):

"Populasi adalah objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan oleh peneliti sebagai unit analisis penelitian".

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian pajak I di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang yang berjumlah 12 orang.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugyiono (2001:56), menyatakan bahwa
"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi".

Adapun teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Pengertian sampling jenuh menurut Sugiyono (2010:85):

> "Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan pengertian diatas, maka sampel yang diambil penulis dalam penulisan ini berjumlah 12 orang.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).* Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research*)
   a. Metode pengamatan (*Observasi*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung.
   b. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
   c. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tetutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pegawai pajak 1 di kantor DPPKAD Kab. Karawang, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Penelitian kepustakaan *(Library Research).* Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.7 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.7.1 Rancangan Analisis

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

1. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.
2. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel *independent* (X) terhadap variable *dependent* (Y) yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.
3. **Analisis Kualitatif**
   Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari variabel X1 (Ekstensifikasi) dan X2 (Intensifikasi), peneliti menggunakan metode kualitatif dengan

mewawancarai narasumber dari divisi yang terkait.

4. Analisis Kuantitatif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dimana data variabel *independent* (X_1) Ekstensifikasi dan (X_2) Intensifikasi yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum di olah dan dipasangkan dengan data variabel *depandent* (Y) Penerimaan Pajak, data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan/pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak

b) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat.

c) Uji Heterokedastisitas

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi regresi dimana varians dari residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Umi Narimawati (2008:5), Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

1.2.5.2 Uji Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya,maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis parsial antara variabel bebas Ekstensifikasi Perpajakan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.
   - H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
   - H_a : Terdapat pengaruh positif yang signifikan Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

b) Hipotesis parsial antara variabel bebas Intensifikasi Perpajakan terhadap variable terikat Penerimaan Pajak.
   - H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.
   - H_a : Terdapat pengaruh positif yang signifikan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

c) Hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

b. Hipotesis Statistik

a) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t). Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*onetail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) :

$\rho \leq 0$ dan hipotesis alternatifnya (H1) : $\rho > 0$

H_0: $\rho \leq 0$: Ekstensifikasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap variabel dan Penerimaan Pajak lebih kecil dari.

H_a: $\rho > 0$: Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel dan Penerimaan Pajak lebih besar.

H_0: $\rho \leq 0$: IntensifikasiPerpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak lebih kecil dari.

H_a: $\rho > 0$: Intensifikasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak lebih besar.

b) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F).

Ho: $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

Ha: $\rho \neq 0$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan ekstensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik ekstensifikasi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak dan memiliki hubungan yang kuat antar variabel. Sesuai dengan hasil penelian Dina Fitriani W dan Putu Mahardika (2009) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak.

Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif, kegiatan ekstensifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai baik dengan nilai persentase sebesar 69,7%. Tetapi untuk indikator wajib pajak terdaftar masih berada dalam kategori cukup baik dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 65,0%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak terdaftar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih dibawah yang diharapkan dan menjawab fenomena bahwa masih banyaknya orang pribadi yang berpenghasilan diatas PTKP tetapi belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2. Pengaruh Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik intensifikasi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak dan memiliki hubungan yang kuat antar variabel. Sesuai dengan hasil penelian Nur Albert (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak.

Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif, kegiatan ekstensifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dinilai baik dengan nilai persentase

sebesar 69,7%. Tetapi untuk indikator penyuluhan pembayaran masih berada dalam kategori cukup baik dengan nilai persentase yang diperoleh sebesar 66,6%. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih dibawah yang diharapkan dan menjawab fenomena bahwa masih kurangnya pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia berakibat kurangnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sehingga berpotensi pendapatan pajak yang tidak bisa digali untuk negara.

3. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak dan memiliki hubungan yang kuat antar variabel. Sesuai dengan hasil penelian Vergina (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak.

Sedangkan berdasarkan analisis deskriptif, realisasi penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Dari data yang disajikan terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009, penerimaan pajak sebesar 1,19%. Pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,09% menjadi 1,10%. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 0,39% menjadi 1,49%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,09% menjadi 1,58% dan pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,36% menjadi 1,22%. Pada tahun 2013 terjadi penurunan sangat signifikan, bahkan terjadi penurunan realisasi penerimaan dibandingkan dengan tahun 2012 hal ini sesuai dengan fenomena realisasi target penerimaan pajak penghasilan tahun 2012 mulai menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2011.Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menyatakan realisasi pajak penghasilan (PPh) non-migas per 28 September 2012 sebesar Rp284,07 triliun. Pencapaian tersebut baru 63,73% dari target Rp445,73 triliun yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.Realisasi target per September tahun ini lebih kecil dari realisasi target pada periode yang sama tahun lalu yang sudah mencapai 71,26%.

V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kepatuhan perpajakan. Terdapat hubungan yang kuat antara ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.
2. Intensifikasi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak. Terdapat hubungan yang kuat antara intensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi perpajakan.
3. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak dan terdapat hubungan yang sangat kuat.Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Pendapatan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang bila memungkinkan lebih meningkatkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan, misalnya dalam meningkatkan wajib pajak terdaftar karena masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan cara mendata ulang wajib pajak yang sudah terdaftar di Kab. Karawang.
2. Kepada Dinas Pendapatan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang bila memungkinkan lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan cara mengadakan sosialisasi perpajakan di beberapa wilayah di Kab. Karawang. Diharapkan dengan lebih ditingkatkannya kegiatan penyuluhan wajib pajak yang belum mengerti dapat memahami bahwa pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang hendaknya dapat melampaui target penerimaan pajak setiap tahun dan tidak terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat, 2007, Statistika dalam kajian deskriftif, inferensi dan nonparametric, EdisiPertama, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Basuki Tjahaja Purnama, 2014, Pengelolaan Pajak Tidak Beres: *www.wartaharian.co*

Dada Rosada, 2013, Sosialisasi Pajak dan Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Tahun 2012: *www.bandung.go.id*

Fuad Rahmany, 2013, Sisa 2 Bulan Lagi, Penerimaan Pajak Baru 72%: *www.merdeka.com*

Fuad Rahmany, 2014, Dirjen Pajak Mengeluh Pegawainya Kurang Banyak: *www.tempo.co*

Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset

Mashuri, 2008,Penelitian Verifikatif, Edisi Pertama, Yogyakarta: Andi Offset

Moh Nazir, 2003, Metode Penelitian, Lima, Jakarta: Ghalia Indonesia

Mohammad Zain, 2005, Manajemen Perpajakan, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat

Nur Indriantoro, 2002, Metodelogi Penelitian Bisnis, Yogyakarta: BPEE UGM

Singgih Santoso, 2002, SPSS 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Jakarta: PT Alex Media Kompetindo

Siti Kurnia Rahayu, 2010, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati, 2013, Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001, Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.7/2004, Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak

Surya Manurung, 2013, Kompleksitas Kepatuhan Pajak: *www.pajak.go.id*

Syafrianto, Lani Dharmasetya, 2007, My Tax SPT-1770 S, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo

Sylvia Veronica, 2013, Ditjen Pajak Perlu Lebih Inovatif dan Persuasif: *www.antaranews.com*

Telisa Aulia Falianty, 2013, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Harus Simultan: *www.skalanews.com*

Umi Narimawati, 2008, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi, Bandung: Agung Media

Umi Narimawati dkk, 2010, Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir, Jakarta: Penerbit Genesis

Undang-undang nomor 28, 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Vergina, 2012, Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

LAMPIRAN

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	No Kuesioner	Skala
Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_1)	Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.	1. Wajib pajak terdaftar. 2. Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahun. 3. Peningkatan dengan adanya kegiatan pendataan objek pajak.	1 2-3 4-5	Ordinal
Intensifikasi Perpajakan (X_2)	Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil	4. Penyuluhan pembayaran administrasi pajak daerah. 5. Penambahan unit-unit pembantu. 6. Peningkatan pelayanan pembayaran pajak secara jabatan.	6-7 8-9 10	Ordinal

	pelaksanaan ekstensifikasi waijb pajak			
Penerimaan Pajak Daerah (Y)	Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} x100\%$	-	Rasio

Lampiran *Output SPSS* Analisisi Regresi Linier Berganda
Regresi Linier Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,807[a]	,651	,573	,08789

a. Predictors: (Constant), Intensifikasi, Ekstensifikasi

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,130	2	,065	8,386	,009[b]
	Residual	,070	9	,008		
	Total	,199	11			

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

b. Predictors: (Constant), Intensifikasi, Ekstensifikasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,601	,167		3,599	,003
	Ekstensifikasi	,044	,021	,474	2,039	,036
	Intensifikasi	,021	,011	,448	1,925	,043

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Ekstensifikasi	,474	,712
	Intensifikasi	,448	,700

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

Output Uji Hipotesis Parsial (Uji *t*)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,601	,167		3,599	,003
	Ekstensifikasi	,044	,021	,474	2,039	,036
	Intensifikasi	,021	,011	,448	1,925	,043

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,601	,167		3,599	,003
	Ekstensifikasi	,044	,021	,474	2,039	,036
	Intensifikasi	,021	,011	,448	1,925	,043

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

Output Uji Hipotesis Simultan (Uji *f*)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,130	2	,065	8,386	,009[b]
	Residual	,070	9	,008		
	Total	,199	11			

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan

b. Predictors: (Constant), Intensifikasi, Ekstensifikasi